BAB V

SIMPULAN DAN SARAN-SARAN

1.1 Simpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian dan pembahasan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah pengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Gorontalo, Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis penelitian. Sehingga dapat diketahui jika sebuah sistem sangat berpengaruh terhadap kualitas lporan yang dihasilkan karena sistem akuntansi keuangan merupakan prosedur yang menyajikan berbagai informasi terkait adanya transaksi-transaksi keuangan yang berkaitan dengan aset daerah yang perlu dijaga dan di kelola dengan baik.
2. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Gorontalo. hasil ini sesuai dengan hipotesis kedua dalam penelitian ini. Artinya jika sistem pengendalian intern dilakukan dengan baik pada setiap tingkat kegiatan yang dilakukan, maka akan tercipta susana yang aman dan jauh dari kecurangan yang akan mungkin terjadi jika tidak dilakukan pengendalian. Pada setiap Kegiatan pengendalian juga harus terus malakukan revieu kerja untuk mengetahui sejauh mana kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan pmerintahan.
3. Hasil penelitian menemukan bahwa secara simultan sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Gorontalo. dapat

disimpulkan bahwa jika sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern bekerja secara bersamaan dengan saling melakukan pengendalian pada setiap prosedur akuntansi yang dilakukan oleh sistem akuntansi keuangan daerah maka kinerja pemerintah juga akan baik dan laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik dalam memberikan setiap informasi mengenai aset daerah.

1.2 Saran

Dari hasil analisis dan pembahasan serta kesimpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Melalui pengujian indikator pada variabel sistem akuntansi keuangan daerah dengan nilai terendah sebesar 80% terletak pada indikator akuntansi aset tetap dan penyajian laporan keuangan. dengan skor terndah menjelaskan bahwa pemerintah daerah dalam melakukan pelaksanaan akuntansi aset tetap daerah masih terdapat beberapa kendala diantanya terkait dengan keterlambatan dalam mangakui aset dipenyajian laporan keuangan pada periode akuntansi berjalan sehinga pada setiap akir perode masih ditemukan hal-hal yang dapat menghambat kualitas laporan keuangan. sehingga diharapkan agar indikaor akuntansi aset tatap ini diperhatiakan lagi oleh pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo agar menjadi motivasi dalam meningkatktkan kualitas laporan keuangan yang lebih baik.
2. Melaui pengujian indikator pada variabel sistem pengendalian intern dengan nilai terndah sebesar 65% yakni indikator kegiatan pengendalian dengan instrumen pertanyan terkait dokumun dan catatan kegiatan yang disediakan. Dengan skor terendah menjelaskan bahwa dalam hal kegiatan pengendalian

pemerintah daerah masih kurang memaksimalkan aktivitas pengendaliannya, sehingga untuk indikator tersebut sebaiknya lebih di perhatikan dengan cara malekukan otorisasi pada setiap tingkat kegiatan yang dilakukan dengan memberikan pengarahan dan pelatihan kepada pengawai terkait kegiatan pengendalian

3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan objek penelitian tidak terbatas hanya sistem akuntansi keuangan dan sistem pengendalian intrn, namun dapat menembah variabel independent lain yang mungkin memiliki pengeruh juga terhadap kualitas laporan keuangan. karena berdasarkan hasil pengujian nilai koefisien determinasi sebesar 61% dipengaruhi oleh sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor- faktor lain.

DAFTAR PUSTAKA

Armando, Gerry, 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nillai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Pada SKPD Kota Bukittinggi*, Skripsi.* Universitas Negeri Padang.

Andini, Dewi dan Yusrawati, 2015. Pengaruh Kompetenti Sumber daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Lporan Keuangan Daerah pada SKPD Kabupaten Empat Lawang Selatan*, Jurnal.* Universitas Islam Riau.

Bastian, Indra. 2006. *Akuntasi Sektor Publik,* Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga

----------2009. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: BPFE YOGYAKARTA.

BPK RI. 2015. *Penyampaian LHP BPK RI Atas LKPD TA 2014: BPK RI Memberikan Opini WTP Untuk Pemerintah Kabupaten Gorontalo.* Diakses pada tanggal 15 Februari 2016, dari www.gorontalo.bpk.go.id

Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah.* Jakarta: PT. Indeks.

----------2009. *Pengelolaan Keungan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks.

Hartanti, Bambang. 1999. *Sistem Pengendalian Intern.* Yogyakarta: BPFE YOGYAKARTA.

Halim, Abdul. 2004, *Akuntansi Sektor Publik,Akuntansi Keuangan Daerah.* Salemba Empat: Jakarta.

----------2012. *Akuntansi Sektor Publik.* Salemba Empat: Jakarta.

Imam, Ghozali. 2006. *Aplikasi analisis multivariate dengan program Spss.* Edisi 3. Semarang: badan penerbit Universitas Diponegoro.

Mahmudi, 2007.*Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, Dan Masyarakat Dalam Pengembilan Keputusan Ekonomi, Sosial, Dan Politik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

----------2004, *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Dua).* Yogyakarta: Andi.

Martono, Nanang. 2012. *Metode penelitian kualitatif analisis isi dan analisis data sekunder.* Jakarta: Rajawali Pers.

Muhammad Gade. 2000. *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Mulyadi, 2001, *Sistem Akuntansi,* Salemba Empat: Jakarta.

----------2002, *Auditing,* edisi 6, Salemba Empat: Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Standar Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tetang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Permendagri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Intern Di Pemerintah Dilingkungan Kementrian Dan Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.

Peraturan Mentri Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tetang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengawasan Dilingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Kementrian Daerah Tahun 2013.

Sekaran, Uma. 2006. *Research Methodos For Businness.* Salemba Empat.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D).* Bandung: Alfabeta.

-------- 2014. *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Tanjung, Abdul Hafiz, 2009. *Akuntansi Pemerintah Daerah.* Alfabeta: Bandung.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah.

Windiastuti, Ruri, 2013. Pengaruh sumber daya Manusia Bidang Akuntansi Dan Stem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada DPPKAD Kota Bandung, *Jurnal.* Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

Yensi, Dewi safitri, 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi, *Jurnal.* Fakultas Ekonomi Universitas Riau.